

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK YANG TERKAIT
DENGAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA
PADANG**

TESIS

Oleh:

**RINRANI PATRISIA
1420122002**

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. YASWIRMAN.,MA**
- 2. NENENG OKTARINA.,SH.,MH**



**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**THE REALIZATION OF DIVORCE CASE DECISIONS
RELATED TO WIFE AND CHILD SUPPORT
in THE PADANG RELIGIOUS COURT**

**(Rinrani Patrisia, 1420122002, Magister of Notaries Faculty of Law Andalas University,
Page 96, Padang, 2017)**

ABSTRACT

Marriage does not always fulfill expectations and dreams so results in divorce. For Moslem citizen, a divorce is deemed valid after a decision of the Religious Court. In case of divorce, the religious court considers the case and reaches a verdict regarding the support of the wife and children after the divorce. However, in fact, wife and children do not get the rights according to the decisions made which causes the delay in the divorce proceedings. Some research questions around divorce related to wife and child support are: (1) How are divorce case decisions related to wife and child support carried out at the Religious Court Padang for civil servants and people who are not civil servants?(2) What are the legal consequences imposed to husband in the implementation of the decision?The author uses an empirical juridical methodology to investigate how the law is applied particularly in divorce decisions related to wife and child support in the Padang Religious Court. From the result of the research and interview which have been conducted, it can be concluded that; First, for a husband with Civil Servant status, in the implementation of the verdict 680/Pdt.G/2013/PA.Pdg the amount of children support given is no longer based on the salary of former wife. While in government regulation 10, 1983 jo. regulation. 45 1990 and State Employment Agency circular 8/SE/1983, the right of former wife of a civil servant does not cease even though her former husband has married again. For husbands who are not civil servants, the verdict: 294/Pdt.G/2013/PA.Pdg applies if the minimum child support agreed to in the divorce decision is not paid. Second, the legal consequences which are imposed to husband by verdicts 680/Pdt.G/2010/PA.Pdg, 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg, and 0294/Pdt.G/2013/PA.Pdg are disertation support, *iddah* support, *mut'ah* money, and children support.

Keywords: Divorce Decision, Divorce, Support, Civil servant,

PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK YANG TERKAIT DENGAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG

**(Rinrani Patrisia, 1420122002, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Hal 96, Padang, 2017)**

ABSTRAK

Tujuan perkawinan tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, sehingga berdampak terjadinya perceraian. Khusus untuk Warga Negara yang beragama Islam, perceraian baru dapat dikatakan sah apabila telah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak, Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian selalu mempertimbangkan dan memutuskan tentang nafkah istri dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Meskipun begitu, pada kenyataannya istri dan anak tidak mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan putusan yang ada. Sehingga terhambatnya pelaksanaan putusan perceraian tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tesis ini. Adapun permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan putusan perkara cerai talak yang terkait dengan nafkah istri dan anak bagi PNS dan bagi Non PNS di Pengadilan Agama Padang? 2. Apa saja akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Padang. Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Untuk pihak suami yang berstatus PNS, pada pelaksanaannya, putusan no. 680/Pdt.G/2013/PA.Pdg nafkah anak jumlahnya tidak lagi diberikan sesuai dengan putusan, gaji mantan istri tidak lagi diberikan. Padahal dalam PP no. 10 tahun 1983 jo. PP no. 45 Th 1990 dan SE Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983, hak mantan istri tersebut tidak berakhir meskipun mantan suami yang seorang PNS telah menikah lagi. Dan untuk yang berstatus Non PNS, putusan nomor: 294/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pelaksanaannya tidak memberikan nafkah anak sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan dalam putusan perceraian tersebut.; *Kedua*, Akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan nomor 680/Pdt.G/2010/PA.Pdg, 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg dan 0294/Pdt.G/2013/PA.Pdg adalah; nafkah tertinggal; nafkah iddah; uang mut'ah; dan nafkah anak.

Kata Kunci: Putusan Perceraian, Cerai Talak, Nafkah